PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani Nomor I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 23 September 2025

Nomor : 800/6359/204.3/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor: 800/243/204/2025 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), maka bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) wajib dilaporkan oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib melaporkan LHKPN dan/atau SPT Tahunan yang dilaporkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) paling lambat tanggal 31 Maret 2025;
3. Namun dari data yang diperoleh didapatkan hasil bahwa ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melapor SPT Tahunan Tahun 2024 baru mencapai 66,95% dari total ASN wajib lapor sebagaimana data terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara menugaskan ASN (selain CPNS 2024) di Instansi Saudara agar segera melaporkan SPT Tahunan Tahun 2024 dan mengunggah data tersebut di Si-Master sebelum tanggal 30 September 2025. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Sdr. Febitya (WA. 0877-0333-4460).

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196704091992022003

Balai Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

NO	INSTANSI	Jumlah ASN	Yang Sudah Lapor	Persentase (%)
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	170	170	100,00%
2	RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR	896	862	96,21%
3	RSUD DR. SAIFUL ANWAR	1473	1409	95,66%
4	RSUD DR. SOETOMO	2553	2437	95,46%
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	684	635	92,84%
6	RSUD DR. SOEDONO MADIUN	1024	948	92,58%
7	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN MALANG	1294	1186	91,65%
8	DINAS KESEHATAN	9259	8483	91,62%
9	RS JIWA MENUR	440	399	90,68%
10	DINAS KEHUTANAN	794	719	90,55%
11	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	79	70	88,61%
12	RSUD SUMBERGLAGAH	340	300	88,24%
13	BADAN KOORDINASI WILAYAH MADIUN	58	51	87,93%
14	RSUD KARSA HUSADA BATU	452	397	87,83%
15	DINAS SOSIAL	759	664	87,48%
16	RSUD DAHA HUSADA	216	188	87,04%
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	152	132	86,84%
18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	67	58	86,57%
19	RS PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR	156	133	85,26%
20	RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	244	207	84,84%
21	SEKRETARIAT DPRD	130	110	84,62%
22	RSUD HUSADA PRIMA	337	283	83,98%
23	RS MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	179	150	83,80%
24	RSUD DUNGUS	269	225	83,64%
25	BADAN KOORDINASI WILAYAH BOJONEGORO	55	46	83,64%
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	141	117	82,98%
27	RS PARU JEMBER	291	238	81,79%
28	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN JOMBANG	1256	1019	81,13%
29	BIRO ORGANISASI	47	38	80,85%
30	UPT PELATIHAN KESEHATAN MASYARAKAT MURNAJATI	57	46	80,70%
31	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	86	69	80,23%
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	90	72	80,00%
33	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI	54	43	79,63%
34	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	705	561	79,57%
35	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	66	52	78,79%
36	BIRO HUKUM	47	37	78,72%
37	DINAS PERHUBUNGAN	643	506	78,69%
38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	168	132	78,57%
39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN	86	67	77,91%
40	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN LAMONGAN	1284	972	75,70%
41	INSPEKTORAT PROVINSI	152	115	75,66%
42	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BOJONEGORO	3082	2309	74,92%
43	BADAN KOORDINASI WILAYAH MALANG	52	38	73,08%
44	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	522	380	72,80%
45	BADAN KOORDINASI WILAYAH PAMEKASAN	40	29	72,50%
46	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN	935	676	72,30%

	BANGKALAN			
47	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	144	103	71,53%
48	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PACITAN	977	698	71,44%
49	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	49	35	71,43%
50	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN GRESIK	1041	743	71,37%
51	BADAN KOORDINASI WILAYAH JEMBER	41	29	70,73%
52	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	46	32	69,57%
53	BIRO PEREKONOMIAN	52	36	69,23%
54	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BONDOWOSO	1713	1182	69,00%
55	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI	1600	1083	67,69%
56	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	142	96	67,61%
57	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN NGANJUK	1329	895	67,34%
58	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	160	106	66,25%
59	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH JEMBER	2600	1716	66,00%
60	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KEDIRI	2057	1349	65,58%
61	BIRO UMUM	154	99	64,29%
62	DINAS PERKEBUNAN	135	85	62,96%
63	BADAN PENDAPATAN DAERAH	770	484	62,86%
64	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO	1567	983	62,73%
65	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MALANG	2016	1249	61,95%
66	DINAS PENDIDIKAN	40853	25182	61,64%
67	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	751	461	61,38%
68	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH SIDOARJO	3372	1927	57,15%
69	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	132	75	56,82%
70	UPT LABORATORIUM HERBAL MATERIA MEDICA BATU	46	26	56,52%
71	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN	865	474	54,80%
72	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN	1836	1004	54,68%
73	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR	1487	809	54,40%
74	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PROBOLINGGO	1427	769	53,89%
75	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH TULUNGAGUNG	2474	1330	53,76%
76	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PONOROGO	2159	1159	53,68%
77	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	642	344	53,58%
78	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	178	94	52,81%
79	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	127	59	46,46%
80	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	95	43	45,26%
81	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	89	40	44,94%
82	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN SUMENEP	761	342	44,94%
83	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	151	67	44,37%
84	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	43	19	44,19%
85	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KABUPATEN SAMPANG	671	288	42,92%
86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	82	33	40,24%
87	DINAS PETERNAKAN	333	129	38,74%
88	CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH MADIUN	2857	963	33,71%
89	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	204	67	32,84%
90	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	310	95	30,65%

Balai Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.